

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mengakibatkan perusahaan-perusahaan bersaing untuk menjadi perusahaan multinasional. Salah satu cara untuk dapat mengembangkan usaha dan dapat bersaing adalah memperoleh sumber pendanaan. Satu dari beberapa cara supaya sumber dana tersebut dapat terpenuhi yaitu dengan berinvestasi atau menerbitkan saham yang dimiliki perusahaan kepada pihak luar yang sering kali disebut dengan *go public*. Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya di pasar modal sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas khususnya bagi investor sebagai pihak yang memerlukan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya (Puspitasari dan Latrini, 2014). Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu tempat bagi perusahaan untuk memperdagangkan sahamnya. Perusahaan *go public* yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan perusahaannya secara berkala. Hal ini dapat berdampak pada kualitas suatu informasi keuangan yang akan di laporkan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman di Indonesia sangat pesat. Sektor makanan dan minuman merupakan peluang bisnis yang memiliki prospek cerah di Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kebutuhan yang sangat besar serta daya beli

yang tinggi. Industri makanan dan minuman nasional memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri makanan dan minuman permintaan konsumen terhadap produk. Meski mengalami penurunan akibat wabah Covid-19, sektor makanan dan minuman tetap berperan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Kondisi perkembangan industri di Indonesia saat ini mulai bangkit kembali dengan ditandai adanya kenaikan PDB atau Produk Domestik Bruto. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 37,82% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sehingga menjadikannya sebagai sub sektor dengan kontribusi PDB terbesar setelah mengalami fluktuatif pada kurun waktu 2020-2022.

Berdasarkan FASB terdapat dua konsep informasi keuangan supaya dapat berguna bagi pengambil keputusan. Informasi dalam laporan keuangan harus mengandung dua unsur yaitu relevan dan *reliable* (Rusmin dan Evans, 2017). Syarat suatu informasi dapat dikatakan relevan salah satunya adalah tepat waktu (*timeliness*). Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan (IAI, 2012) serta suatu kewajaran dan pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan yang harus disediakan oleh auditor. Ketepatanwaktuan (*timeliness*) dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kemampuan investor dalam mengakses informasi keuangan tanpa harus melakukan penelitian terdahulu terhadap perusahaan yang akan dituju.

Dimulai dari 31 Desember 2012, pengalihan fungsi serta tujuan BAPEPAMLK ke OJK. Peraturan berlandaskan Undang-undang No. 21 tahun 2011 yaitu mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik No.29/POJK04/2016 yang menyatakan bahwa ketika tahun buku berakhir maka perusahaan *go public* wajib menyediakan *annual report* setelah diaudit paling lambat 120 hari kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Namun faktanya walaupun pihak OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan serta penetapan sanksi atau denda bagi perusahaan yang melanggar, namun tetap saja ditemukan sebagian besar perusahaan *go public* mengalami *audit delay*. Ini dapat dibuktikan dari beberapa fenomena yang terjadi seperti atas dasar tinjauan oleh BEI tahun 2019 ada sepuluh perusahaan terlambat dalam penyampaian *annual report* per 31 Desember 2018 yang telah diaudit hingga bulan Juni 2019 sehingga dari pihak bursa terpaksa memberikan peringatan tertulis serta tambahan denda (Bursa Efek Indonesia, 2019). Selain itu, sebanyak 42 perusahaan yang sudah *go public* hingga Juni tahun 2020 belum juga menyampaikan *annual report* per 31 Desember 2019 yang sudah diaudit walaupun sudah diberikan kelonggaran waktu atau dispensasi batas waktu dalam menyampaikan laporannya (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Berdasarkan laman resmi Bursa Efek Indonesia, sejumlah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman telah diberikan teguran tertulis II dan dikenakan denda sebesar 50 juta karena tidak segera mengungkapkan laporan keuangan auditan 2020-2022 dan tidak mematuhi sanksi denda, dan persyaratan pembayaran. Kekhususan spesifik dari

perusahaan-perusahaan ini adalah PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM), PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO), PT Golden Plantation Tbk (GOLL) dan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP). Fenomena lainnya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dimana BEI melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada 1 Juli 2019. Suspensi ini dilakukan karena perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan audit 2018 dan belum melakukan pembayaran denda (investasi.kontan.go.id, 2020). Harga saham AISA mengalami penurunan sebesar 6,37% ke level Rp147. Menurut analisis sekuritas, hal ini terjadi dikarenakan kecenderungan jual investor yang sudah lama ingin menjual saham ini namun tidak bisa diakibatkan oleh suspensi (market.bisnis.com, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diterima perusahaan akibat telatnya penyampaian dapat menyebabkan respons negatif dari pihak investor karena mengindikasikan keadaan buruk perusahaan.

Audit delay sangat penting bagi perusahaan agar dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan terhindar dari sanksi. Sedangkan, *audit delay* penting untuk investor karena lamanya proses audit dapat memberikan indikasi mengenai kondisi dalam perusahaan, sebagai pertimbangan dalam melakukan keputusan investasinya. Fenomena keterlambatan publikasian laporan keuangan karena *audit delay* tentunya mengakibatkan kepercayaan dari seorang investor akan menurun dan mempengaruhi harga jual saham dan tentu hal ini berdampak sangat buruk

bagi perkembangan perekonomian pasar modal. Suatu hal yang menyebabkan terjadinya *audit delay* yaitu proses audit harus dijalankan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat bukti yang memadai. Standar tersebut menyebabkan proses auditor membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berakibat penundaan publikasi laporan audit atau laporan keuangan oleh akuntan publik (Verawati & Wirakusuma, 2016).

Audit delay atau disebut juga dengan *audit report lag* yang merupakan lamanya penyelesaian audit yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan yang merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Semakin cepat proses pengauditan laporan keuangan, maka semakin cepat pula waktu publikasi laporan keuangan dan sebaliknya. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor.

Terdapat berbagai faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya *audit delay* salah satunya adalah ukuran KAP. KAP memiliki ukuran – ukuran yang berbeda sehingga dari perbedaan ukuran tersebut dapat memberikan

opini dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan yang berbeda. Besar ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diukur dari besarnya *revenue* yang didapatkan per tahun. Kantor Akuntan Publik dinilai baik dan kompeten apabila mempunyai manajemen audit yang baik, sehingga dalam menjalankan tugas audit, KAP dapat lebih tanggap dalam melakukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penyelesaian audit laporan keuangannya dilakukan lebih singkat dan dapat mengurangi adanya *Audit Delay*. Ukuran KAP terbagi menjadi KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Putri, dkk (2021) dan Sari dan Nisa (2022) menyatakan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit delay*, kualitas laporan audit dapat menjadi tolak ukur besarnya suatu KAP yang selanjutnya dapat mempengaruhi waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Prasetyo dan Rohman (2022) dan Lutfiani dan Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Dan penelitian Devina dan Fidiana (2022) dan Foster, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini bahwa semua KAP akan berusaha untuk menjaga reputasi dan profesionalisme yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

Selain Ukuran KAP, faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Pemberian *unqualified opinion* merupakan *good news* yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung memiliki *audit delay*

yang lebih pendek Parwati dan Yohanes (2009). Pada perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* akan terjadi negosiasi antara auditor dengan perusahaan tersebut, selain itu auditor juga perlu berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin meyakinkan opininya, akibatnya *audit delay* akan relative lebih lama. Apabila auditor memberikan opini selain *unmodified opinion* terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka diindikasikan *audit delay* semakin panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Aishi dan Chariri (2022) dan Putri, dkk (2021) bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista, dkk (2022) dan Siahaan, dkk (2021) bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, dkk (2021) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lainnya adalah komite audit yang juga salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan bertujuan untuk membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam pelaporan keuangan. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mereka mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal termasuk proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite mengatakan bahwa seluruh perusahaan *go public* diwajibkan untuk membuat komite audit paling tidak beranggotakan 3 orang

yang terdiri atas satu orang sebagai ketua dan dua orang lainnya sebagai anggota komite audit Rizkyllah (2018). Komite audit menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut penelitian terdahulu Arista, dkk (2022), Hakim dan Sagiyanti (2018), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Anggota komite audit yang semakin banyak dalam proses audit maka semakin cepat selesai dan meminimalkan *audit delay*., hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Rohman (2022), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selain itu solvabilitas, lebih khususnya rasio hutang modal atau *debt to equity ratio*, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya. Carslaw dan Caplan (1991) menyampaikan bahwa ukuran kondisi keuangan perusahaan dapat dinilai dengan melihat proporsi hutang serta modal yang dimiliki. Jumlah hutang yang banyak akan mengakibatkan perusahaan memberikan *bad news* nantinya kepada pihak luar atau pemangku kepentingan. Maka dari itu, tingkat solvabilitas tinggi mencerminkan perusahaan mempunyai hutang yang tinggi, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan proses audit karena adanya bukti transaksi yang kompleks bersangkutan dengan hutang yang harus dikaji. Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *audit delay*. Menurut Prasetyo dan Rohman (2022) solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay* dalam sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat tinggi-

rendahnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang akan menyebabkan pelaporan dan pemeriksaan terhadap pemeriksaan utang perusahaan. Semakin lama pelaporan dan pemeriksaan tersebut dilakukan maka akan memperlambat proses pelaporan audit laporan keuangan oleh auditor. Namun Menurut Deviana dan Fidiana (2019), solvabilitas perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Muchran, dkk (2021) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay*, ukuran perusahaan dengan indikator total aset. Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aset perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dalam total aset, nilai pasar saham dan lain-lain Suparsada & Putri (2017). Ukuran perusahaan menggambarkan jumlah yang besar dari total aset perusahaan, yang akan membuat manajemen mempercepat proses audit. Hasil penelitian Sunarsih, dkk (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* serta mempunyai arah yang positif. Hal ini berbeda dengan penelitian Prasetyo dan Rohman (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang negatif terhadap *audit report lag*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nisa (2022) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dari uraian latar belakang yang telah disebutkan dan adanya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang mengenai **“Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Komite Audit, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022?
2. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022?
4. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022?

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, informasi dan referensi tambahan terkait determinan atau faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

Dapat memberikan informasi dari hasil penelitian mengenai perusahaan yang mengalami *audit delay*, sehingga emiten dapat menanggulangi penyebab terjadinya *audit delay*. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya *audit delay* dan ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan.



UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Dalam teori agensi, agen dikontrak untuk menyelesaikan tanggung jawab dan memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh *principal*. Kewajiban *principal* adalah memberikan imbalan dari jasa yang telah diberikan agen. Pada teori agensi menyebutkan bahwa terdapat pemisahan antara *principal* (pemilik) dengan agen (manager) yang menjalankan perusahaan. Namun pada perkembangannya dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pihak pemilik dan manajemen, yaitu pemegang saham (investor) dan manajemen sebagai pihak agen (direksi). Terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen akan menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agency theory*). Konflik keagenan muncul dikarenakan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan agen, yaitu pihak *principal* menginginkan mendapatkan laba yang maksimal sedangkan pihak agen menginginkan bonus yang besar. Adanya konflik keagenan tersebut sehingga berdampak pada terhambatnya perusahaan untuk mencapai kinerja yang positif.

Agency theory dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan melalui tingkat ketepatan waktu informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen kepada pemilik perusahaan dengan melihat tanggal penyampaian laporan keuangan. Dan untuk meminimalisir masalah keagenan dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor independen sebagai penengah untuk memeriksa dan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan agen sebagai pengelola kekayaan perusahaan. Dalam hal ini, ukuran perusahaan dan solvabilitas sebagai besaran dan karakteristik yang di percayakan *principal* pada agen, komite audit dan ukuran KAP sebagai mediator yang menjadi penengah untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan agen.

Asumsi teori agensi menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah

keagenan (*agency problem*). Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan agen, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mencegah terjadinya *asymmetric information* ini salah satu caranya yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara tepat waktu, hal ini karena laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan bagi *principal*. Informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri yang erat kaitannya dengan *teory agency*. Teori agensi menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perusahaan, seperti kesalahan manajemen atau kondisi keuangan yang buruk, sehingga dapat memperpanjang *audit delay*.

2.1.2 Audit Delay

Audit delay merupakan rentang atau panjang jangka waktu dalam menyelesaikan auditnya yang dihitung dari tanggal laporan keuangan berakhir sampai tanggal penerbitan laporan atau opini audit (Handoyo & Oktafiani, 2019). Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib

menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir bersamaan dengan laporan tahunan bagi pemegang saham. Perusahaan yang melakukan *audit delay* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusannya.

Audit delay adalah sesuatu yang dapat memengaruhi keakuratan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan memengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Handoyo & Oktafiani, 2019). Perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya disebabkan karena *audit delay* melebihi batas waktu yang ditentukan Bapepam-LK dan BEI akan diberikan sanksi dan denda yang ditetapkan oleh Peraturan Bapepam-LK (Pinatih & Sukartha, 2017). *Audit delay* yang panjang pada perusahaan berdampak negatif bagi berbagai pihak, bukan hanya bagi pihak eksternal yang beranggapan bahwa sedang terjadi masalah dalam kinerja perusahaan, namun bagi pihak internal perusahaan tersebut cenderung akan menggantikan auditor eksternalnya agar tidak terjadi keterlambatan serupa (Hakim & Sagiyaniti 2018).

2.1.3 Ukuran KAP

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik dengan mengelompokkan KAP menjadi KAP berafiliasi asing atau berafiliasi dengan *Big Four* dan tidak berafiliasi atau non-*Big Four*. Kantor

Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa professional dalam praktek akuntan publik (Rachmawati, 2008).

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*Big four accounting firms*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big four accounting firm*), karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan. Selain itu, KAP besar lebih banyak mengeluarkan pendapat *going concern* daripada KAP kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP besar lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dalam mengeluarkan pendapat yang sesuai dan memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi *going concern* perusahaan sehingga menarik klien lebih banyak.

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau tepat waktu. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu kemungkinan dapat meningkatkan reputasi kantor akuntan publik dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian besar kecilnya Ukuran Kantor Akuntan Publik kemungkinan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

Menurut Arens (2015:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar

Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga. Adapun perusahaan yang termasuk di dalam *the big four* di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan Tanudiredja, Wibisana & Rekan KAP
- b) KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama dengan KAP Sidharta & Widjaja
- c) KAP Ernest & Young (E & Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja
- d) KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio

2. Kantor Nasional

Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.

3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar

Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.

4. Kantor Lokal Kecil

Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien - kliennya.

Dari keempat pengkategorian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional big four, yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *big four*, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.

- b) KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non *big four*, yaitu KAP asing non *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing non *big four*, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya.
- c) KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.
- d) KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.
- e) KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari orang tenaga kerja profesional.

2.1.4 Opini Audit

Opini audit menurut *International Standards on Auditing (ISA)* yaitu kesimpulan yang ditarik atas hasil laporan keuangan dengan rangkaian bukti pendukung dan evaluasi. Laporan keuangan yang telah di audit merupakan hal yang penting dan *assurance* karena menjadi sarana

komunikasi bagi para auditor atas temuan mereka. Pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan auditor untuk mendapatkan keyakinan atas laporan keuangan perusahaan.

Opini auditor dinyatakan dalam bentuk opini, dan bukan pernyataan atas fakta absolut atau jaminan. Auditor disyaratkan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk kesimpulan bahwa perusahaan telah mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing No. 29 pada SPAP menyatakan bahwa terdapat lima jenis opini auditor yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan auditor tidak memberikan opini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Opini audit ada lima jenis sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya. Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan oleh auditor jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan bahasa penjas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a) Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b) Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- c) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan

menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

- d) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini akan diberikan oleh auditor apabila ia menilai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam arti disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dilihat dari keseluruhan laporan, namun ada hal-hal tertentu atau ada kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- a) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b) Kondisi-kondisi yang ada di luar kekuasaan klien maupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting.
- c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

d) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor yang dibatasi sehingga tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang bersifat luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan *opinion disclaimer*.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran

laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor maka akan merasa puas dan cenderung tidak akan melakukan *auditor switching*. Sebaliknya, jika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian maka perusahaan tidak merasa puas dan cenderung akan melakukan *auditor switching*.

Carslaw dan Kaplan (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara opini auditor dengan *audit delay*. Perusahaan yang tidak menerima jenis pendapat akuntan wajar tanpa pengecualian akan menunjukkan *audit delay* lebih panjang dibanding perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit (Elliot dalam Halim 2000). Selain itu, perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dianggap sebagai *bad news* sehingga penyampaian laporan keuangan akan diperlambat.

2.1.5 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit menjadi perantara dalam menyelesaikan masalah pengendalian perusahaan antara pemegang saham, dewan komisaris dan pihak manajemen (Mualimah *et al.*, 2015). Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 4 menjelaskan bahwa komite audit memiliki anggota paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka audit delay akan semakin singkat.

Menurut lampiran surat keputusan dewan direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-339/BEJ/07- 2001, peraturan tentang pembentukan komite audit, disebutkan bahwa: "Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan

fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat". Di Indonesia, keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan sangatlah penting. Sehingga adanya ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit;
- b) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 yang menyatakan Komite Audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh komisaris/ dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektifitas komite audit dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan komite audit dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Komite audit akan efektif apabila mereka independen dari pengaruh manajemen, memahami proses pelaporan keuangan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dezoort *et al.* (2002), menjelaskan empat faktor dalam menentukan keefektifan komite audit yaitu:

- a) Komposisi : keahlian, independensi, integritas dan objektivitas.
- b) Otoritas : pertanggungjawaban dan pengaruh terhadap manajemen dan auditor.
- c) Sumber daya : kecukupan jumlah keanggotaan, akses kepada manajemen, internal dan eksternal auditor.
- d) Diligent : insentif, motivasi dan ketekunan

2.1.6 Solvabilitas

Solvabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan. Solvabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk menghitung sejauh mana suatu perusahaan dapat melunasi seluruh kewajibannya secara finansial, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dengan ketersediaan dari jumlah aset yang dimiliki dengan segala kemungkinan jika perusahaan mengalami likuidasi. Apabila tingkat solvabilitas tinggi berarti perusahaan tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, hal tersebut mengindikasikan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan meningkatkan tingkat kehati-hatian auditor dalam mengaudit laporan keuangan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kliennya oleh sebab itu besar kecilnya utang menyebabkan waktu penyelesaian audit yang lebih lama atau resiko perusahaan mengalami *audit delay* semakin tinggi.

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang.

Rasio ini disebut juga rasio *leverage*. Tingginya rasio *debt to equity* atau rasio hutang modal mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk. Sedangkan menurut Kartika (2011) tingginya rasio hutang ke ekuitas menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar maupun kecil perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya jumlah aset perusahaan (Ningsih & Widhiyani, 2015). Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung mendapatkan tekanan yang tinggi dari berbagai pihak eksternal terkait informasi dalam laporan keuangannya. Ukuran suatu perusahaan dapat dinyatakan pada jumlah aset keseluruhan perusahaan, di dalam ukuran suatu perusahaan terdapat tiga variabel yaitu total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar yang menentukan ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan

dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Ukuran perusahaan terhadap *audit delay* ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva maka semakin pendek *audit delay* dan begitu sebaliknya. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan rata-rata total aset perusahaan, penggunaan total aktiva didasarkan pada pertimbangan bahwa total aktiva itu adalah cerminan dari ukuran perusahaan dan diduga memengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* adalah sebagai berikut:

1. Puspitasari dan Latrini (2014) mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan *leverage* dan anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2. Charviena dan Tjhoa (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Rugi Operasi, Solvabilitas, Umur Perusahaan, Klasifikasi Industri, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay pada perusahaan Indeks Kompas Periode 2012 – 2014. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay sedangkan laba rugi operasi, solvabilitas, umur perusahaan, klasifikasi industry dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Hakim & Sagiyaniti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Komite Audit, Dan Ukuran Kap Terhadap *Audit Delay*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2014-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya jenis industri yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, komite audit, dan ukuran KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit delay*. Secara simultan ukuran perusahaan, jenis industri, komite audit, dan ukuran KAP.
4. Devina & Fidiana (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran KAP, Audit Tenure Dan Solvabilitas Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di (BEI) Periode 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay* yang berarti bahwa besarnya perusahaan dan tingginya profit yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan laporan audit dapat selesai dalam waktu yang singkat. Sedangkan variabel ukuran KAP, audit tenure dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

5. Siahaan, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah opini audit, pergantian auditor, kesulitan keuangan, ukuran komite audit, frekuensi meeting dan keahlian anggota. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa opini audit dan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu, pergantian auditor, ukuran komite audit, frekuensi meeting dan keahlian anggota tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
6. Lisa & Hendra (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *auditor switching*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*.

7. Sulmi, dkk (2020) mengenai Pengaruh Opini Audit, Komite dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
8. Foster, dkk (2021) mengenai Pengaruh Ukuran KAP, Audit Tenure dan Fee Audit Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Jasa dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP, audit tenure dan fee audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
9. Sunarsih, dkk (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Solvabilitas dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keterlambatan laporan audit. Profitabilitas, opini audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap keterlambatan laporan audit.
10. Putri dkk (2021) yang meneliti mengenai Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Opini Audit, Ukuran KAP dan *Audit Delay* di Perusahaan

Transportasi. Dengan menggunakan variabel bebasnya yaitu ukuran perusahaan, komite audit, opini audit dan ukuran KAP. Sedangkan variabel terikatnya yaitu *Audit Delay*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, ukuran perusahaan, opini audit dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

11. Muchran, dkk (2021) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Dengan menggunakan variabel bebas yaitu profitabilitas, solvabilitas dan reputasi KAP. Sedangkan variabel terikatnya yaitu *audit delay*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *audit delay*, solvabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.
12. Sari & Nisa (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

13. Prasetyo & Rohman (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit, Opini Audit, Dan Reputasi Kap Terhadap *Audit Report Lag* perusahaan manufaktur dan jasa yang listing BEI tahun 2019 dan 2020. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan komite audit dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
14. Aishi & Chariri (2022) melakukan penelitian mengenai Determinan *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompleksitas misi audit, opini audit, dan hutang finansial berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan reputasi KAP, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
15. Arista, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite

audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Jumlah anggota komite audit dan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan rapat komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

16. Lutfiani dan Nugroho (2023) yang meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay*. Dengan menggunakan variabel bebasnya yaitu profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor. Sedangkan variabel terikatnya yaitu *audit delay*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan solvabilitas dan opini auditor berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit delay*.